



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-17/PB/PB.6/2022 02 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, *Upload* Ulang/*Push* Data ke Aplikasi e-Rekon&LK, dan Penyampaian LKKL Tahun 2021 *Audited*

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (sesuai Lampiran I)

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 *Audited*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat kami nomor S-16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN Versi 21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*, disebutkan sebagai berikut:
 - a. Seluruh satker di K/L yang belum menerapkan SAKTI secara penuh **wajib** melakukan pemutakhiran/*update* Aplikasi Persediaan versi 21.1.0, SIMAK BMN versi 21.2.0, dan SAIBA versi 21.2.0, serta selanjutnya menggunakan *update* aplikasi dimaksud dalam penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*.
 - b. Seluruh satker di K/L yang belum menerapkan SAKTI secara penuh **wajib** melakukan pengiriman data ulang dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK BMN dan SAIBA, serta mengunggah/*upload* ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK, **kecuali** untuk satker yang memenuhi **seluruh** kriteria berikut:
 - 1) Telah berstatus Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB);
 - 2) Tidak terdapat selisih data antara Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, dan SAIBA dengan data pada Aplikasi e-Rekon&LK; **dan**
 - 3) Tidak terdapat data BMN tidak wajar dalam validasi K3 2020 dan K3 2021 pada Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi e-Rekon&LK.
 - c. Dalam rangka *upload* ulang ke Aplikasi e-Rekon&LK, satker dan K/L agar mengidentifikasi dan memetakan perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* sebagai dampak penggunaan dan tindak lanjut *update* aplikasi. Pemetaan atas akun-akun di Neraca Percobaan yang dimungkinkan terdampak akibat *update* aplikasi sebagaimana dalam Lampiran II surat ini.
 - d. Perubahan data sebagai dampak penggunaan dan tindak lanjut *update* aplikasi agar dikomunikasikan dan diajukan ke BPK sebagai penyesuaian (koreksi audit), untuk disajikan dalam LKKL Tahun 2021 *Audited*.
2. Selain perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* yang terjadi sebagai dampak penggunaan *update* aplikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, guna menyajikan koreksi data/transaksi yang diperlukan dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*, maka:
 - a. K/L dapat melakukan perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN mulai tanggal 11 s.d. 27 April 2022, meliputi:

- 1) Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus (kewenangan Ditjen Perbendaharaan);
 - 2) Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data (kewenangan Ditjen Perbendaharaan);
 - 3) Penyelesaian administrasi dalam rangka pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - 4) Pengajuan SP3B BLU oleh satker BLU dan penerbitan SP2B BLU oleh KPPN;
 - 5) Penyelesaian koreksi data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara.
- b. K/L dapat melakukan perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN terkait aset dan jurnal akrual mulai tanggal 11 s.d. 29 April 2022.
- c. Seluruh perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* (baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf b) untuk menjadi LKKL Tahun 2021 *Audited*, harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK pada masing-masing K/L.
- d. Pengajuan perubahan data yang mengakibatkan perubahan data SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN agar melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L (format Surat Pernyataan sebagaimana Lampiran III surat ini).
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, untuk mengakomodasi perubahan data LKKL Tahun 2021 *Unaudited* selanjutnya perlu dilaksanakan *upload ulang/push* data pada Aplikasi e-Rekon&LK dengan berpedoman pada Lampiran IV surat ini.
4. Sesuai dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Nomor 229/S/XV/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Pemeriksaan LKPP Tahun 2021, penyampaian LKKL Tahun 2021 *Audited* diatur sebagai berikut:
- a. K/L memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* dan *hardcopy* LKKL Tahun 2021 *Audited* dengan data pada Aplikasi e-Rekon&LK.
 - b. LKKL Tahun 2021 *Audited* harus dilengkapi Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility (SOR)* yang telah ditandatangani.
 - c. Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL Tahun 2021 *Audited*.
 - d. LKKL Tahun 2021 *Audited* dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id dan dalam bentuk *hardcopy* dapat dikirimkan pada kesempatan pertama ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 1, Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta 10710.
 - e. LKKL Tahun 2021 *Audited* disampaikan paling akhir 10 Mei 2022 untuk K/L Non Signifikan dan paling akhir 16 Mei 2022 untuk K/L Signifikan (pemetaan K/L Non Signifikan dan K/L Signifikan sebagaimana Lampiran V).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN I
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-17/PB/PB.6/2022
Tanggal : 02 April 2022

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-17/PB/PB.6/2022

Tanggal : 02 April 2022

**Pemetaan Dampak Pergeseran Angka dalam LKKL Tahun 2021
Akibat Update Aplikasi**

No	Penyesuaian Aplikasi	Dampak ke LKKL	Akun-akun di Neraca Percobaan yang Dimungkinkan Terdampak
1	Perbaikan atas ketidaktepatan penyajian saldo persediaan	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) • 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) • 593xxx (Beban Persediaan) • 313211 (Transfer Keluar) • 59312x (Beban Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) • 596121 (Beban Persediaan Rusak/Usang) • 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) • 57xxxx (Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang) • 593141 (Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga)
2	Penyelesaian selisih data persediaan antara Aplikasi Persediaan dengan SAIBA	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)
3	Penambahan menu Koreksi Persediaan	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) • 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) • 593xxx (Beban Persediaan) • 313211 (Transfer Keluar)



			<ul style="list-style-type: none"> • 59312x (Beban Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) • 596121 (Beban Persediaan Rusak/Usang) • 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) • 57xxxx (Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang) • 593141 (Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga)
4	Penyesuaian fitur K3		
	4a. Penyelesaian selisih data antara SIMAK BMN dengan e-Rekon&LK	Pergeseran data BMN	-
	4b. Normalisasi dan tindak lanjut normalisasi (input normalisasi atau hapus normalisasi)	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 13xxxx (Aset Tetap) • 162xxx, 166xxx (Aset Lainnya) • 136111 (Konstruksi Dalam Pengerjaan) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 391118 (Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi) • 137xxx (Akumulasi Penyusutan) • 1693xx (Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya) • 591xxx (Beban Penyusutan Aset Tetap) • 59211x (Beban Amortisasi Aset Lainnya) • 169122 (Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan) • 592222 (Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah)
5	Perbaikan menu Input Normalisasi	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 133111 (Gedung dan Bangunan) • 132111 (Peralatan dan Mesin) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 137211 (Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan)

			<ul style="list-style-type: none"> • 137111 (Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin) • 591211 (Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 591111 (Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin)
6	Kesalahan <i>mapping</i> kode barang ke kode akun neraca	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 133111 (Gedung dan Bangunan) • 132111 (Peralatan dan Mesin) • 135121 (Aset Tetap Lainnya) • 137211 (Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 137111 (Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin) • 591211 (Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 591111 (Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin)
7	Perbaiki <i>posting rule</i> BPYBDS (BMN yang dihentikan)	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 313121 (Diterima dari Entitas Lain) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 391118 (Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi)
8	Sesuai S-16/PB/PB.6/2022, apabila seluruh proses penyelesaian selisih data antar aplikasi termasuk K3 telah dilakukan namun masih terdapat perbedaan data per akun antara Posisi BMN di Neraca (pada e-Rekon&LK dan SIMAK BMN) dengan Neraca Percobaan (pada e-Rekon&LK dan SAIBA), satker agar melakukan jurnal penyesuaian pada SAIBA.		<ul style="list-style-type: none"> • Akun-akun terkait transaksi Aset Tetap/Aset Lainnya.

**SURAT PERNYATAAN KPA UNTUK PERUBAHAN
DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja*)
berupa pengesahan SP3B-BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3/Koreksi data transaksi
keuangan/penyelesaian pagu minus/koreksi pagu/belanja dan pendapatan**) yang mengakibatkan
perubahan data SPAN, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja :
4. Eselon I :
5. Kementerian Negara/Lembaga :

dengan ini menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan sebagaimana tersebut di atas
telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa Kementerian Negara/Lembaga
.....***) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN
menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

Keterangan:

- *) Nama Satuan Kerja
- **) Coret yang tidak perlu
- ***) Nama Kementerian Negara/Lembaga



LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-17/PB/PB.6/2022

Tanggal : 02 April 2022

Pelaksanaan *Upload Ulang/Push* Data pada Aplikasi e-Rekon&LK atas Perubahan Data Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*

1. *Upload ulang/push* data pada Aplikasi e-Rekon&LK atas perubahan data dilakukan pada periode rekonsiliasi Bulan Desember 2021. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi periode Desember 2021 dalam rangka *upload ulang/push* data atas perubahan data diatur sebagai berikut:
 - a. ***Upload ulang atas perubahan data yang terjadi sebagai dampak update aplikasi (khusus K/L yang belum menerapkan SAKTI secara penuh)***
 - 1) Bagi satker pada K/L Non Signifikan, *open period* dan *upload ulang* pada Aplikasi e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 April 2022. *Closed period* pada tanggal 7 April 2022.
 - 2) Bagi satker pada K/L Signifikan, *open period* dan *upload ulang* pada Aplikasi e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 April 2022. *Closed period* pada tanggal 9 April 2022.
 - 3) *Setting Open/Closed period* akan dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tanpa pengajuan/permohonan dari K/L.
 - 4) Untuk dapat melakukan *upload ulang* pada Aplikasi e-Rekon&LK, terlebih dahulu dilakukan reset BAR untuk seluruh satker yang wajib *upload ulang* oleh KPPN. Reset BAR dilakukan oleh KPPN tanpa pengajuan/permohonan reset BAR dari satker kepada KPPN.
 - 5) Seluruh satker mengidentifikasi, memetakan, dan memastikan bahwa perubahan data pada Aplikasi e-Rekon&LK hanya terkait dampak penggunaan *update* aplikasi. Pemetaan atas akun-akun dalam Neraca Percobaan yang terdampak sebagai akibat *update* aplikasi agar mengacu pada Lampiran II.
Bilamana terdapat perubahan data yang bukan merupakan dampak penggunaan *update* aplikasi, agar dilakukan perbaikan dan kembali melakukan *upload ulang*.
 - 6) KPPN memastikan bahwa perubahan data satker pada Aplikasi e-Rekon&LK hanya terkait dampak penggunaan *update* aplikasi (sesuai pemetaan atas a



akun dalam Neraca Percobaan yang terdampak sebagai akibat *update* aplikasi pada Lampiran II). Bilamana data telah sesuai, maka ditindaklanjuti dengan penyelesaian rekonsiliasi sampai dengan memperoleh status BAR Siap Download.

- 7) Seluruh satker dan KPPN memastikan pada *closed period* bahwa status rekonsiliasi pada Aplikasi e-Rekon&LK adalah BAR Siap Download.

b. Upload ulang/push data atas koreksi data/transaksi audited

- 1) K/L mengajukan permohonan *open* dan *closed* Aplikasi e-Rekon&LK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rentang waktu *open period* adalah tanggal 11 s.d. 29 April 2022.
 - 2) Pengajuan permohonan *open* dan *closed* disertai daftar permintaan *reset* BAR satker secara terpusat kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permintaan *reset* BAR dilakukan secara selektif hanya untuk satker yang mengalami perubahan data serta telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L.
 - 3) KPPN melakukan *reset* BAR sesuai permintaan dan daftar *reset* BAR satker dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - 4) Satker dan KPPN memastikan bahwa perubahan data pada Aplikasi e-Rekon&LK hasil *upload ulang/push* data telah sesuai. Bilamana belum sesuai, agar dilakukan perbaikan dan kembali melakukan *upload ulang*.
3. Dalam rangka mengakomodasi perubahan data telah sepenuhnya dilakukan *upload ulang/push* data ke Aplikasi e-Rekon&LK, ketentuan jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b dapat diberikan berdasarkan pengajuan/permohonan dari K/L dengan persetujuan dari Tim Pemeriksa BPK masing-masing K/L.
 4. K/L mengajukan permohonan jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b dengan disertai surat pernyataan bahwa *upload ulang/push* data telah disetujui Tim Pemeriksa BPK K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

LAMPIRAN V
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-17/PB/PB.6/2022
Tanggal : 02 April 2022

Daftar K/L Signifikan dan K/L Non Signifikan

No.	Kementerian Negara/Lembaga
K/L Signifikan	
1	Kementerian Pertahanan RI
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3	Kementerian Keuangan RI
4	Kementerian Pertanian RI
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
6	Kementerian Perhubungan RI
7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
8	Kementerian Kesehatan RI
9	Kementerian Agama RI
10	Kementerian Ketenagakerjaan RI
11	Kementerian Sosial RI
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
14	Kepolisian Negara RI
K/L Non Signifikan	
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3	Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5	Mahkamah Agung RI
6	Mahkamah Konstitusi RI
7	Komisi Yudisial RI
8	Kejaksaan Agung RI
9	Kementerian Sekretariat Negara RI
10	Kementerian Dalam Negeri RI
11	Kementerian Luar Negeri RI
12	Kementerian Perindustrian RI
13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI



17	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
18	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
19	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
21	Badan Riset dan Inovasi Nasional
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
25	Badan Intelijen Negara
26	Badan Siber dan Sandi Negara
27	Dewan Ketahanan Nasional
28	Badan Pusat Statistik
29	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
30	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
31	Perpustakaan Nasional
32	Badan Pengawas Obat dan Makanan
33	Lembaga Ketahanan Nasional
34	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
35	Badan Narkotika Nasional
36	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
37	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
38	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
39	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
40	Komisi Pemilihan Umum
41	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
42	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
43	Badan Tenaga Nuklir Nasional
44	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
45	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
46	Badan Informasi Geospasial
47	Badan Standardisasi Nasional
48	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
49	Lembaga Administrasi Negara
50	Arsip Nasional RI
51	Badan Kepegawaian Negara
52	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
53	Kementerian Perdagangan RI
54	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
55	Komisi Pemberantasan Korupsi
56	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
57	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

58	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
59	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
60	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
61	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
62	Ombudsman RI
63	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
64	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
65	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
66	Sekretaris Kabinet
67	Badan Pengawas Pemilu
68	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
69	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
70	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
71	Badan Keamanan Laut
72	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
73	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban